



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PANDANARUM**

Jalan Raya Pandanarum KM 1
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53464
<https://pandanarum.banjarnegarakab.go.id> E-mail: kecpandanarum123@banjarnegarakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 500.12.12/ 56 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN
DI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024**

**CAMAT PANDANARUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pandanarum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 538, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 488.5/127 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Petugas Informasi di Kecamatan Pandanarum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Lampiran : Keputusan Camat Pandanarum
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 500.12.12 / 56 / Tahun 2024
Tanggal : 21 Oktober 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKWENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Data Pribadi	UU No. 24/2013 ttg perubahan atas UU No. 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan P.1 (22)	Tdk terbatas	Mengungkap rahasia personal	Melindungi data pribadi
2.	Data Profil pegawai beserta keluarga	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl. 17 h	Selama menjadi ASN	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
3.	Data pegawai mendapat hukuman disiplin	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl. 17 h	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari PNS bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
4.	Hasil Penilaian SKP	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl. 17 h	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari PNS bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
5.	Data Pribadi Penduduk	- UU No. 24/2013 ttg perubahan atas UU No. 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan P.1 (22)	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari penduduk	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi

		- UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h - UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44	bersangkutan			
6.	Laporan pemeriksaan BPK	hasil	UU No 15/2004 P 19 dan UU No 15/2006 ttg BPK P 7	Setelah LHP diserahkan ke DPRD masih digunakan	Mengganggu Privasi pihak terpiksa Munculnya persaingan yang tidak sehat	Rahasia pihak terpiksa terjaga Dapat obyektifitas penilaian
7.	Dokumen penawaran penyediaan jasa		Perpres No 54/2010 ttg Pengadaan barang/jasa Pemerintah	Tdk terbatas	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Menghambat proses penegakan hukum	- Melindungi rahasia pribadi - Memperlancar proses penegakan hukum
8.	Identitas Aduan Masyarakat		- UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 a dan h - UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44			
9.	Dokumen Kontrak		UU No 30/2014 ttg Administrasi pemerintahan, Perpres RI No 54/2010 ttg Pengadaan barang/jasa Pemerintah	Sampai proses audit BPK	Menghambat kesuksesan kebijakan krm adanya pengungkapan ser prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama

